

RISET KEBIJAKAN

2020-10-05 14:45:40 by

**Melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan
dokumen bahan perencanaan pembangunan
(Kajian terkait Unsur Kegiatan Fungsional Perencana
menurut PERMENPAN RB No.4 Tahun 2020)**

Andi Aidil Pratama, SE,MM (Perencana Ahli Muda pada BBPPKS Makassar)

Email : dileox@gmail.com

ABSTRAK

Untuk mendukung sebuah kebijakan,dirasa perlu adanya sebuah penelitian/ riset tentang kebijakan tersebut, baik terkait dengan masalah kebijakan, hasil maupun dampak yang akan ditimbulkan oleh suatu kebijakan tersebut.

Istilah kebijakan digunakan untuk menggambarkan tentang suatu kegiatan yang mencakup penentuan tujuanm penentuan prioritas, penyusunan rencana dan menspesifikasi aturan-aturan dalam pembuatan keputusan (Gorda, Lewis, dan Young, 1993). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siapapun yang memiliki otoritas atau kewenangan dalam pembuatan kebijakan, yang merentang dari mulai penentuan tujuan sampai pembuatan keputusan, yang didalamnya mencakup kegiatan menentukan skala prioritas, penyusunan rencana dan penentuan aturan-aturan dalam pengambilan keputusan ini semua disebut dengan kebijakan. Jadi pada hakekatnya kebijakan itu merupakan bidang yang menjadi kewenangan pemerintah pada berbagai level, dan pemegang otoritas kewenangan pada sektor swasta, yaitu para pimpinan organisasi ataupun para manajer pada berbagai level organisasi atau lembaga.

Dokumen bahan perencanaan harus berdasarkan data yang merupakan sebagai bahan perencanaan. kebijakan berbasis bukti sangat erat hubungannya dengan data yang tersedia. Sebab data ini nanti akan ditranspormasi menjadi informasi untuk pengambilan keputusan kebijakan.

Untuk mendapatkan data seorang perencana harus melakukan riset atau penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah. Namun, ada beberapa perbedaan mendasar antara peneliti dan perencana dalam melakukan penelitian, diantaranya seorang peneliti dapat melakukan penelitian dengan jangkan waktu yang lama sedangkan dalam penelitian kebijakan waktu yang diperlukan relatif singkat dan membahas perhatian publik pada saat tertentu. Selain itu, seorang peneliti biasanya berfokus untuk menghindari kesalahan tipe I dan tipe II untuk menyimpulkan hasil, sedangkan untuk seorang perencana yang harus dihindari adalah kesalahan tipe II yakni memecahkan masalah yang salah.

PENDAHULUAN

Angka kredit merupakan dasar penilaian bagi kuantitas maupun kualitas produktifitas para perencana. Untuk itu pra perencana dituntut untuk lebih produktif dan berkualitas serta profesional dalam menjalankan tugasnya, karena kenaikan pangkat dan jabatan serta tunjangan jabatan ditentukan kuantitas dan kualitas produknya.

Ada tiga tugas utama seorang fungsional perencana sesuai dengan tingkatnya, yaitu 1. Kegiatan perencanaan, 2 . pengembangan profesi dan yang ke 3. Penunjang profesi fungsional perencana.

Dalam laporan ini, kami mencoba menyusun laporan terkait unsur PENGEMBANGAN PROFESI fungsional perencana (Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasilgagasan sendiri di bidang Perencanaan Pembangunan yang tidak dipublikasikan:) sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No.4 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Perencana, unsur kegiatan perencanaan bagi jabatan fungsional Perencana Ahli Muda yaitu : Melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan;

Maksud dan tujuan saya sebagai Fungsional Perencana menyusun laporan ini adalah sebagai pemenuhan unsur Pengembangan Profesi Fungsional Perencana Kementerian Sosial RI dan untuk memudahkan saya dalam melakukan unsur Kegiatan Perencanaan sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ada, karena dalam laporan ini saya mengulas tentang maksud dan arti tiap poin unsur kegiatan perencanaan yang tercantum sesuai JUKNIS Fungsional Perencana yang ada.

Saya sadar dalam laporan ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran dari siapa saya yg terkait dengan laporan ini.

KAJIAN PUSTAKA

Riset Kebijakan

Secara sederhana Studi/ riset kebijakan dapat didefinisikan sebagai kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mendukung kebijakan, Seperti halnya penelitian-penelitian sosial atau penelitian terapan, penelitian kebijakan diarahkan untuk memberi efek terhadap tindakan praktis, yaitu pemecahan masalah sosial.

Riset kebijakan atau studi kebijakan merupakan salah satu jenis riset yang difokuskan pada kebijakan, baik dalam rangka pembuatan, evaluasi pelaksanaan, maupun perubahan atau perbaikan. Ditinjau dari prinsip, prosedur, metodologi dan tekniknya riset jenis ini sama dengan yang digunakan dalam riset ilmiah pada umumnya. Namun, ditinjau dari kepentingan, jenis riset ini dilakukan bukan untuk kepentingan pengembangan sains, melainkan untuk kepentingan yang bersifat spesifik dan praktis yaitu untuk mencari dasar membuat kebijakan,

menganalisisnya, mengkritisisnya atau mengevaluasi kebijakan itu sendiri maupun implementasinya.

Agar dapat menghindari berbagai dampak yang tidak diharapkan dari suatu kebijakan, maka sebelum suatu kebijakan itu direncanakan dan dibuat perlu dilakukan analisis secara mendalam dan komprehensif. Patton dan Sawicki (1993) memandang, bahwa analisis kebijakan merupakan suatu proses sirkuler dalam merencanakan, membuat, melaksanakan dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan suatu kebijakan. Suatu kebijakan sebaiknya dibuat dengan mempertimbangkan data hasil riset. Setelah kebijakan itu dilaksanakan, juga perlu dilakukan minitoring dan evaluasi agar pelaksanaan kebijakan itu selain terus berada dalam jalurnya, juga memberi dampak secara positif. Analisis yang dilakukan secara mendalam itu didasarkan atas data hasil riset atau studi kebijakan.

Perencanaan Pembangunan

Perencanaan adalah sebuah patokan untuk mempermudah tercapainya suatu tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Menurut Alder dan Rustiadi (2008:339) menyatakan bahwa perencanaan adalah, "Suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya".

Perencanaan adalah suatu proses yang menguraikan tujuan dari organisasi, serta menentukan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan merupakan prosesproses yang penting dari semua fungsi manajemen sebab tanpa perencanaan (Planning) fungsi pengorganisasian, pengontrolan maupun pengarahan tidak akan berjalan. dalam arti seluas-luasnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (maximum output) dengan sumber-sumber yang ada agar lebih efisien dan efektif.

Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai dilakukan, bagaimana, bilamana, dan oleh siapa. Albert waterston menyebutkan perencanaan adalah melihat kedepan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan.

Berikut beberapa pengertian pembangunan menurut para ahli:

Todaro : Pembangunan dibagi dalam tiga komponen dasar, sebagai basis konseptual dan pedoman praktis dalam memahami pembangunan yang paling hakiki yakni kecukupan yang mmenuhi kebutuhan pokok, meningkatkan rasa harga diri atau jati diri serta kebebasan dalam memilih. Selanjutnya, Todaro mengemukakan bahwa pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai hal yang mendasar atas struktur sosial sikap-sikap masyarakat, dan institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, pengentasan kemiskinan.

Ginanjar kartasmista: Pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik

melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Siagian : Pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara atau bangsa yang menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building).

Deddy T.Tikson: Pembangunan merupakan transformasi ekonomi, strategi dan budaya yang secara sengaja melalui kebijakan dan juga strategi menuju kearah yang diinginkan.

Surkino : Pembangunan adalah suatu usaha proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat dapat meningkat dalam jangka panjang. Jadi pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana dengan menggunakan sumberdaya untuk mencapai tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Terkait tugas dan fungsi sebagai seorang Pejabat Fungsional Perencana pada Kementerian Sosial RI, maka dirasa perlu untuk melakukan kajian pemahaman tentang unsur kegiatan perencanaan sesuai dengan Pedoman jabatan Fungsional Perencana yang ada agar kita lebih mudah dalam pemenuhan unsur tersebut.

Dari uraian di atas, maka dapat dianggakt rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang dimaksud dengan Melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan?
2. Apakah guna Melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan?
3. Bagaimanakah Melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan?

PEMBAHASAN

1.Pengertian Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan akan menjadi bahan pedoman atau acuan dasar bagi pelaksanaan pembangunan (action plan). Oleh karena itu, perencanaan pembagunan hendaknya bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan) Terdapat banyak pengertian perencanaan pembangunan menurut para ahli dan menurut undang-undang No. 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional :

Riyadi dan Bratakusumah: perencanaan pembangunan adalah suatu proses prumusan alternatif-alternatif atau keputusan–keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan / aktivitas.

Conyers dan Hills: Perencanaan pembangunan adalah suatu proses berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan

sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

Arthur W.Lewis: perencanaan pembangunan merupakan suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk mendorong masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumberdaya yang tersedia secara lebih produktif.

M. L. Jhingan: Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu didalam jangka waktu tertentu pula.

Perencanaan pembangunan menurut uu no. 25 tahun 2004 mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai berikut” Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.

2.Guna Riset Kebijakan

Adalah agar dapat menghindari berbagai dampak yang tidak diharapkan dari suatu kebijakan, maka sebelum suatu kebijakan itu direncanakan dan dibuat perlu dilakukan analisis secara mendalam dan komprehensif. Patton dan Sawicki (1993) memandang, bahwa analisis kebijakan merupakan suatu proses sirkuler dalam merencanakan, membuat, melaksanakan dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan suatu kebijakan. Suatu kebijakan sebaiknya dibuat dengan mempertimbangkan data hasil riset. Setelah kebijakan itu dilaksanakan, juga perlu dilakukan minitoring dan evaluasi agar pelaksanaan kebijakan itu selain terus berada dalam jalurnya, juga memberi dampak secara positif. Analisis yang dilakukan secara mendalam itu didasarkan atas data hasil riset atau studi kebijakan.

Riset kebijakan dapat dipandang sebagai suatu sistem standar, aturan, dan prosedur untuk menciptakan, menilai secara kritis dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan (Pardon, Lessof, Woodfield, dan Bryson, 2001).

3.Metode Riset Kebijakan

Pelaksanaan riset kebijakan bersifat multidisiplin dan ada keseimbangan antara riset-riset deskriptif, eksplanatori dan evaluatif. Pada umumnya menggunakan pendekatan kuantitatif jarang terjadi riset menggunakan pendekatan kualitatif. Pelaksanaan riset kebijakan menggunakan metode dalam riset ilmiah. Semua prinsip, kaidah, komponen, dan langkah dalam melaksanakan riset ilmiah digunakan dalam riset kebijakan. Yang membedakan adalah riset ilmiah untuk kepentingan akademik, riset kebijakan adalah adanya analisis kebijakan, baik yang menjadi dasar dalam melakukan riset maupun analisis kebijakan yang akan di ambil, yang dilakuakn berdasarkan data hasil riset-riset itu.

Oleh karena itu kepentingan riset kebijakan adalah untuk mengkaji berbagai aspek yang terkait dengan suatu kebijakan tertentu berdasarkan data yang diperoleh dari hasil riset, maka kedudukan analisis kebijakan sangat penting. Analisis kebijakan ini dilakukan dalam konteks penyusunan rencana dan dalam konteks perumusan kebijakan setelah dilakukan pembahasan terhadap berbagai temuan hasil riset berdasarkan data yang dikumpulkan dan dianalisis.

Dalam konteks pembuatan kebijakan, analisis kebijakan menempuh enam langkah, yaitu : 1) memverifikasi, mendefinisikan dan mendalami masalah; 2) merumuskan kriteria evaluasi; 3) mengidentifikasi berbagai alternatif kebijakan; 4) mengevaluasi alternatif kebijakan; 5) mengurai karakteristik setiap alternatif kebijakan; dan 6) memonitor implementasi kebijakan (Patton dan Sawicki, 1993)

Pada langkah pertama, dilakukan verifikasi masalah berdasarkan data hasil riset, kemudian dirumuskan pertanyaan-pertanyaan tentang berbagai kemungkinan alternatif kebijakan dan elaborasinya. Langkah kedua, dirumuskan sejumlah kriteria yang akan digunakan dalam melakukan evaluasi terhadap berbagai alternatif kebijakan dalam berbagai perspetif. Langkah ketiga, dilakukan kajian untuk mengidentifikasi berbagai alternatif kebijakan ditinjau dari perspektif teoritis, diverifikasi menggunakan data hasil riset, dilakukan pembahasan mendalam terhadap hasil riset. Langkah keempat, dilakukan evaluasi terhadap berbagai alternatif kebijakan menggunakan berbagai kriteria yang telah dirumuskan. Langkah kelima berbagai alternatif kebijakan itu dibandingkan satu sama lain dengan cara memasang-masangkan secara kombinasi setiap alternatif kebijakan, kemudian menganalisis dari sisi kekuaran dan kelemahan masing-masing terutama akibat dan dampaknya apabila kebijakan itu dipilih. Pada langkah keenam, dilakukan pilihan kebijakan yang akan dibuat, dan apabila kebijakan itu dilaksanakan dimonitor pelaksanaannya sehingga selalu berada pada jalur yang benar.

Analisis ini dilakukan secara kuantitatif meskipun kadang-kadang dibutuhkan juga dukungan dari analisis kualitatif. Analisis kuantitatif menggunakan metode statistika yang sesuai terutama banyak sekali melibatkan penggunaan teori peluang.

Atas dasar ini, langkah-langkah dalam melakukan riset kebijakan adalah :

1. Perumusan latar belakang atau rasional dilakukannya riset kebijakan. Dalam latar belakang ini dikaji berbagai faktor yang melatarbelakangi dilakukannya riset kebijaka, yang dikaitkan dengan fokus kebijakan yang akan dirumuskan.
2. Perumusan masalah. Rumusan masalah riset ini dibuat dengan mengelaborasi problematika tentang fokus kebijakan yang akan diambil
3. Kajian teori. Pada bagian ini kebijakan yang akan dijadikan fokus studi dibahas secara teoritis dengan mengacu kepada suatu teori besar tertentu (grand theory) serta didiskusikan berbagai hasil studi terkait berdasarkan berbagai kajian yang dibahas dalam berbagai literatur, khususnya berbagai hasil studi yang dilaporkan dalam berbagai artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah terkait.
4. Kerangka berpikir. Rumusan kerangka berpikir ini merupakan model pengkajian dalam studi tentang kebijakan yang menjadi fokus studi
5. Analisis kebijakan yang menjadi fokus studi. Kebijakan yang dijadikan fokus studi

dianalisis dari berbagai aspek dan dimensi

6. Perumusan prosedur riset. Dalam perumusan ini ditetapkan subjek yang akan menjadi sumber data serta teknik penyampelan yang digunakan; metode dan teknik riset serta jenis dan rancangan instrumen riset; dan metode analisis data yang akan digunakan.
7. Pengembangan instrumen riset. Pengembangan riset mengacu kepada analisis terhadap fokus kebijakan yang distudi, instrumen perlu dilakukan uji coba dan dianalisis validitas dan reliabilitasnya
8. Pengumpulan dan analisis data. Pengumpulan data menggunakan instrumen yang telah dikembangkan seta diuji validitas dan reliabilitas.
9. Analisis kebijakan. Pelaku riset melakukan pemetaan berbagai alternatif kebijakan secara rinci, keberadaannya, serta berbagai kemungkinan yang akan terjadi dari masing-masing keberadaan itu baik secara kuantitatif maupun kualitatif
10. Perumusan kesimpulan. Berdasarkan hasil diskusi dara dan analisis kebijakan diambil kesimpulan terkait kebijakan tang menjadi fokus studi
11. Rekomendasi kebijakan. Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan itu dirumuskan rekomendasi tentang kebijakan yang diambil.

KESIMPULAN

- Perlu adanya riset kebijakan tertentu yang bermanfaat untuk merumuskan, mengevaluasi, memperbaiki dan meningkatkan kualitas kebijakan baik yang sedang berjalan maupun yang sudah berjalan, serta mengukur dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang ada.
- Agar dapat menghindari berbagai dampak yang tidak diharapkan dari suatu kebijakan, maka sebelum suatu kebijakan itu direncanakan dan dibuat perlu dilakukan analisis secara mendalam dan komprehensif.
- Analisis kebijakan merupakan suatu proses sirkuler dalam merencanakan, membuat, melaksanakan dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan suatu kebijakan. Suatu kebijakan sebaiknya dibuat dengan mempertimbangkan data hasil riset. Setelah kebijakan itu dilaksanakan, juga perlu dilakukan minitoring dan evaluasi agar pelaksanaan kebijakan itu selain terus berada dalam jalurnya, juga memberi dampak secara positif. Analisis yang dilakukan secara mendalam itu didasarkan atas data hasil riset atau studi kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

PERMENPANRB No.4 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Perencana.

<http://repository.uin-suska.ac.id/4112/3/BAB%20II.pdf>

Patton, C. and Sawicki, D. (1993) Basic Methods of Policy Analysis and Planning. Prentice-Hall, Upper Saddle River.

Ismail, Solihin. 2008. Pengantar Manajemen. Jakarta : Erlangga

<http://bbppksmakassar.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=213>